

Efektivitas Pengendalian Biaya Publik, Digitalisasi Informasi Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah dengan Akuntabilitas Sebagai Pemoderasi

¹Hurian Kamela

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

¹melakamel@yahoo.com

Abstract—This study aims to analyze the effect of Public Cost Control Effectiveness and Financial Information Digitalization on Government Performance, with Accountability as a moderating variable. The research employed a quantitative method with a survey approach, targeting the population of residents in DKI Jakarta during the period of June–July 2025. The sample consisted of 185 respondents selected through purposive sampling, based on the criterion of individuals who possess an understanding of government administration. Data were collected using a closed-ended questionnaire with a five-point Likert scale (1–5). The data were analyzed using multiple linear regression through the Stata software. The results reveal that both public cost control effectiveness and financial information digitalization have a positive and significant influence on government performance. Furthermore, accountability was found to strengthen the relationship between these variables and government performance. These findings emphasize that improving cost control effectiveness and optimizing financial information digitalization, supported by strong accountability, can foster a more transparent, efficient, and service-oriented governmental performance. This study provides practical implications for governments to continuously enhance cost control systems and financial information digitalization as part of efforts to strengthen accountable and high-performing public financial governance.

Kata Kunci— Public Cost Control, Financial Information Digitalization, Accountability, Government Performance

I. INTRODUCTION

Pengelolaan keuangan publik sebagai hal penting untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah dituntut untuk menggunakan anggaran secara efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah mempunyai wewenang lebih besar untuk mengatur keuangan publiknya, sehingga diperlukan sistem pengendalian biaya publik yang mampu menjamin tercapainya kinerja yang optimal (Mardiasmo, 2018). Efektivitas pengendalian biaya publik menjadi fokus penting dalam meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Pengendalian biaya tidak hanya sebatas penghematan, melainkan juga pada upaya memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan tujuan, sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat (Anthony & Govindarajan, 2019). Tanpa pengendalian biaya yang efektif, pemerintah berpotensi menghadapi pemborosan anggaran, inefisiensi, hingga rendahnya kualitas pelayanan publik.

Selain pengendalian biaya, digitalisasi informasi keuangan berperan strategis dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Penerapan sistem informasi berbasis teknologi memungkinkan pemerintah untuk menyajikan data keuangan secara real-time, akurat, dan mudah diakses. Hal ini sejalan dengan perkembangan e-government yang menekankan pada keterbukaan informasi publik serta perbaikan kinerja birokrasi (Indrajit, 2020). Digitalisasi informasi keuangan juga meminimalisasi risiko manipulasi dan kesalahan dalam pelaporan keuangan, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan sistem digital, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran dapat dimonitor dengan lebih transparan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa teknologi informasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah, secara efisiensi atau secara kualitas (Susanto, 2017).

Kinerja pemerintah sendiri tidak hanya diukur dari capaian target pembangunan, melainkan juga dari seberapa efektif pemerintah mengelola sumber daya publik. Peningkatan kinerja pemerintah membutuhkan dukungan pengendalian biaya yang baik serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan informasi keuangan. Kedua faktor ini menjadi instrumen penting untuk menciptakan birokrasi yang adaptif, efisien, dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat (Mahsun, 2016). Namun, keberhasilan efektivitas pengendalian biaya publik dan digitalisasi

informasi keuangan terhadap kinerja pemerintah sangat dipengaruhi oleh tingkat akuntabilitas yang dimiliki. Akuntabilitas menjadi faktor moderasi yang memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan publik dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan sesuai regulasi. Tanpa adanya akuntabilitas yang kuat, digitalisasi dan pengendalian biaya tidak akan mampu secara optimal meningkatkan kinerja pemerintah (Bovens, 2010). Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan akuntabilitas keuangan publik melalui digitalisasi, seperti penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan e-budgeting. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat pengawasan masyarakat. Akan tetapi, masih ditemukan permasalahan terkait lemahnya pengendalian biaya serta praktik akuntabilitas yang belum konsisten di berbagai daerah (Kementerian Keuangan RI, 2022). Penelitian ini menganalisis pengaruh efektivitas pengendalian biaya publik dan digitalisasi informasi keuangan terhadap kinerja pemerintah dengan akuntabilitas sebagai pemoderasi. Hasil penelitian diharapkan menciptakan kontribusi teoretis untuk sektor publik, serta menjadi rujukan praktis bagi pemerintah serta perubahan tata kelola menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Efektivitas Pengendalian Biaya Publik

Efektivitas pengendalian biaya publik merujuk pada sejauh mana mekanisme pengendalian seperti perencanaan anggaran yang akurat, pemantauan realisasi biaya, sistem pengendalian internal, dan penggunaan indikator kinerja mampu menekan pemborosan, memastikan alokasi sumber daya sesuai prioritas kebijakan, dan meningkatkan efisiensi operasional instansi pemerintah. Menurut International Monetary Fund (2025), praktik cost accounting yang terintegrasi dengan pengelolaan anggaran publik dapat meningkatkan akuntabilitas fiskal serta kualitas keputusan manajerial. Sarnawiah et al. (2025) menjelaskan efektivitas pengendalian biaya memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas operasional dan kredibilitas kinerja keuangan instansi publik. Perkembangan digitalisasi informasi keuangan memperkuat efektivitas pengendalian biaya publik dengan memungkinkan pemantauan real-time, otomatisasi pengawasan transaksi, dan analitik untuk mendeteksi anomali atau pemborosan. Alassuli (2025) menegaskan bahwa transformasi digital dalam akuntansi dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi risiko manipulasi data keuangan. Selain itu, Zong (2025) menjelaskan bahwa keterbukaan data publik mendorong akuntabilitas dan memperkuat tata kelola keuangan pemerintah. Dengan demikian, efektivitas pengendalian biaya publik akan lebih optimal apabila didukung oleh teknologi digital sekaligus penguatan kapasitas tata kelola dan akuntabilitas birokrasi.

Digitalisasi Informasi Keuangan

Digitalisasi informasi keuangan merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola, menyajikan, dan mendistribusikan data keuangan secara lebih transparan, akurat, dan real-time. Transformasi ini memungkinkan pemerintah melakukan otomatisasi pencatatan transaksi, meningkatkan integritas data, serta mempercepat proses pelaporan keuangan. Menurut Alassuli et al. (2025), digitalisasi akuntansi berkontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi keuangan, khususnya ketika dipadukan dengan tata kelola yang baik. Selain itu, Rivero del Paso et al. (2025) menjelaskan pemanfaatan sistem akuntansi berbasis digital membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan data biaya untuk mendukung pengendalian fiskal dan efisiensi manajemen publik. Lebih lanjut, keterbukaan data keuangan digital juga mendorong terciptanya akuntabilitas yang lebih kuat di sektor publik. Zong (2025) menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik melalui platform digital meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan eksternal. Hal ini diperkuat oleh Sarnawiah et al. (2025) yang menemukan bahwa integrasi teknologi dalam pengelolaan biaya operasional meningkatkan efektivitas pengendalian serta mengurangi potensi penyimpangan. Dengan demikian, digitalisasi informasi keuangan tidak hanya memperbaiki efisiensi teknis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Kinerja Pemerintah

Kinerja pemerintah pada dasarnya mencerminkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya publik untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Menurut OECD (2021), pengukuran kinerja sektor publik semakin menekankan keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan hasil yang dicapai, bukan sekadar pada kesesuaian prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah tidak hanya dilihat dari capaian administratif, tetapi juga dari bagaimana kebijakan mampu menghasilkan nilai publik yang nyata. Penelitian Nurhayati et al. (2022) juga mengonfirmasi bahwa indikator kinerja berbasis outcome menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan publik di era digital. Selain itu, digitalisasi dan transparansi informasi terbukti meningkatkan kualitas kinerja pemerintah melalui penguatan akuntabilitas dan pengambilan keputusan berbasis data. Zong (2025) menegaskan bahwa keterbukaan data publik mendorong peningkatan partisipasi masyarakat sekaligus memperbaiki mekanisme pengawasan terhadap birokrasi. Di sisi lain, Alassuli et al. (2025)

menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi digital meningkatkan transparansi keuangan, yang pada gilirannya memperkuat citra dan kinerja organisasi pemerintah. Dengan demikian, kinerja pemerintah dapat dipandang sebagai hasil sinergi antara efektivitas pengendalian biaya, digitalisasi informasi keuangan, dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola publik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam sektor publik merupakan prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik, setiap penggunaan sumber daya publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, hukum, maupun moral kepada masyarakat. Menurut Bovens (2021), akuntabilitas adalah mekanisme hubungan pertanggungjawaban yang memastikan pejabat publik transparan dalam pengambilan keputusan dan dapat dievaluasi oleh pihak eksternal. Hal ini sejalan dengan penelitian Omar et al. (2023) yang menemukan bahwa penerapan akuntabilitas mendorong peningkatan transparansi laporan keuangan pemerintah sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi pondasi penting untuk menghubungkan pengendalian biaya publik dan digitalisasi informasi keuangan dengan peningkatan kinerja pemerintah. Di era digital, akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan tradisional, tetapi juga melibatkan keterbukaan informasi secara real-time melalui sistem berbasis teknologi. Alassuli et al. (2025) menegaskan bahwa transformasi digital dalam akuntansi publik memperkuat mekanisme akuntabilitas dengan menyediakan data keuangan yang transparan dan mudah diakses. Zong (2025) juga menunjukkan bahwa keterbukaan data publik secara digital memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah, sehingga memperkuat fungsi akuntabilitas sebagai pemoderasi dalam meningkatkan kinerja. Dengan demikian, akuntabilitas berperan strategis sebagai penghubung antara efisiensi pengelolaan biaya, pemanfaatan digitalisasi informasi, dan tercapainya kinerja pemerintahan yang optimal.

Efektivitas pengendalian biaya publik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah karena berkaitan langsung dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan anggaran. Menurut Rivero del Paso et al. (2025), penerapan sistem akuntansi biaya yang efektif di sektor publik mampu memberikan data yang relevan untuk pengambilan keputusan dan memperbaiki kualitas manajemen keuangan. Ketika biaya publik dikendalikan secara efektif, pemerintah dapat meminimalisasi pemborosan, meningkatkan akuntabilitas fiskal, dan memperkuat legitimasi kebijakan anggaran. Hal ini sejalan dengan Sarnawiah et al. (2025) yang menemukan bahwa pengendalian biaya operasional yang efektif di sektor publik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi organisasi. Lebih lanjut, OECD (2021) menekankan bahwa pengelolaan biaya publik yang efisien bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah yang mampu mengendalikan biaya dengan efektif cenderung lebih responsif dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas, sehingga berdampak positif terhadap kinerja secara keseluruhan. Dengan demikian, terdapat dasar teoritis dan empiris yang kuat untuk mengajukan hipotesis bahwa efektivitas pengendalian biaya publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

H1: Efektivitas Pengendalian Biaya Publik berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah

Digitalisasi informasi keuangan telah menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi, akurasi, dan efisiensi pengelolaan keuangan sektor publik. Menurut Alassuli et al. (2025), transformasi akuntansi digital berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi keuangan melalui proses otomatisasi pelaporan dan pengendalian data keuangan secara real-time. Transparansi ini secara langsung berdampak pada peningkatan kepercayaan publik dan efektivitas kinerja pemerintah. Nurhayati et al. (2022) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengukuran kinerja sektor publik di Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas, sehingga berdampak pada kinerja instansi pemerintah. Selain itu, OECD (2021) menekankan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan informasi publik, termasuk keuangan, merupakan katalis dalam memperbaiki tata kelola dan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Digitalisasi bukan hanya mempermudah proses pelaporan, tetapi juga memperkuat pengawasan dan akuntabilitas yang berimplikasi langsung pada peningkatan kinerja organisasi publik. Dengan demikian, terdapat bukti empiris yang mendukung bahwa digitalisasi informasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

H2: Digitalisasi Informasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah

Efektivitas pengendalian biaya publik tidak hanya berfungsi dalam menjaga efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga membutuhkan akuntabilitas untuk memperkuat pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah. Menurut Omar et al. (2023), akuntabilitas publik menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa mekanisme pengendalian biaya benar-benar berjalan efektif dan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Tanpa adanya akuntabilitas yang kuat, efektivitas pengendalian biaya publik berpotensi hanya menjadi prosedur administratif tanpa menghasilkan perubahan nyata terhadap kualitas layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dapat memperkuat hubungan antara pengendalian biaya dan pencapaian kinerja pemerintah. Lebih lanjut, Bovens (2021) menjelaskan

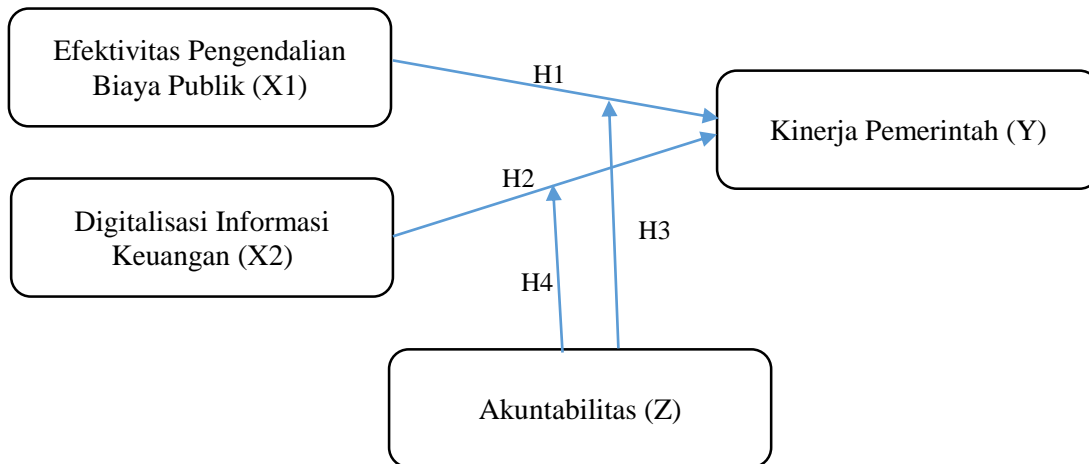
bahwa akuntabilitas dalam sektor publik mendorong terciptanya transparansi dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran, sehingga pengendalian biaya yang efektif dapat diimplementasikan dengan konsisten. OECD (2021) juga menekankan bahwa tata kelola keuangan publik yang berbasis akuntabilitas memungkinkan pemerintah tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang lebih baik. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa akuntabilitas berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh efektivitas pengendalian biaya publik terhadap kinerja pemerintah.

H3: Efektivitas Pengendalian Biaya Publik berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah dengan Akuntabilitas sebagai pemoderasi

Digitalisasi informasi keuangan berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah melalui transparansi, efisiensi, dan kecepatan dalam pengelolaan data keuangan. Namun, agar digitalisasi benar-benar efektif, diperlukan akuntabilitas sebagai penguat dalam penerapan sistem digital tersebut. Menurut Alassuli et al. (2025), transformasi digital dalam akuntansi mampu meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada mekanisme akuntabilitas yang memastikan pemanfaatan informasi tersebut berjalan secara konsisten dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, akuntabilitas bertindak sebagai moderator yang memperkuat pengaruh digitalisasi informasi keuangan terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, Nurhayati et al. (2022) menegaskan bahwa digitalisasi sistem keuangan di sektor publik meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, tetapi hanya efektif apabila disertai dengan tata kelola berbasis akuntabilitas yang mencegah penyalahgunaan teknologi. Sejalan dengan itu, Omar et al. (2023) menekankan bahwa akuntabilitas publik berperan penting dalam memastikan transparansi digital berkontribusi pada peningkatan kinerja, bukan sekadar formalitas administratif. Dengan demikian, akuntabilitas memperkuat hubungan positif antara digitalisasi informasi keuangan dan kinerja pemerintah, menjadikan hipotesis ini relevan untuk diuji secara empiris.

H4: Digitalisasi Informasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah dengan Akuntabilitas sebagai pemoderasi

Kerangka Penelitian



GAMBAR 1. KERANGKA PENELITIAN

Formula (sebelum moderasi):

$$KP_{it} = a + EP_{it} + DI_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Formula (setelah moderasi):

$$KP_{it} = a + EP_{it} * AK_{it} + DI_{it} * AK_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Gambar 1 menjelaskan kerangka penelitian yaitu Efektivitas Pengendalian Biaya Publik (X1), Digitalisasi Informasi Keuangan (X2), Kinerja Pemerintah (Y), Akuntabilitas (Z). Hal ini memberikan penjelasan mengenai formula yang digunakan untuk penelitian ini (sebelum moderasi dan setelah moderasi).

II. METHODS

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei, yang bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas pengendalian biaya publik dan digitalisasi informasi keuangan terhadap kinerja pemerintah dengan akuntabilitas sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di wilayah DKI Jakarta selama 2 bulan (Juni-Juli 2025), sedangkan sampelnya ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria masyarakat yang mengetahui tentang pemerintahan sebanyak 185 orang. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin (1-5). Prosedur penelitian dimulai dengan penyusunan instrumen kuesioner berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian. Pengumpulan data menggunakan kuisisioner. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linier berganda menggunakan aplikasi stata. Selain itu, sebelum dilakukan analisis regresi, data yang telah dikumpulkan akan melalui tahap pengujian kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi jawaban responden. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas guna memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat analisis statistik yang baik dan tidak bias. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda serta uji interaksi (Moderated Regression Analysis/MRA) untuk melihat peran variabel akuntabilitas sebagai variabel pemoderasi. Seluruh pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Stata dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

III. RESULTS AND DISCUSSION

TABEL 1. GENDER

Sampel	Jumlah
Laki-laki	78
Perempuan	107
Total	185

Sumber: Diolah (2025)

Tabel 1 menjelaskan 185 responden yang terlibat dalam penelitian ini, terdapat 78 responden laki-laki dan 107 responden perempuan. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, dengan selisih sebanyak 29 orang. Komposisi tersebut mencerminkan bahwa partisipasi perempuan dalam konteks penelitian ini cukup dominan, yang mengindikasikan keterlibatan aktif dalam kegiatan pemerintahan atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik. Perbedaan proporsi gender ini juga menunjukkan adanya keseimbangan yang relatif baik dalam representasi responden, meskipun dominasi perempuan sedikit lebih tinggi. Keterlibatan perempuan yang lebih besar dapat menggambarkan peningkatan partisipasi dalam bidang administrasi publik dan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan tren terkini di sektor pemerintahan yang menunjukkan peningkatan peran perempuan dalam posisi strategis serta pengambilan keputusan, khususnya dalam penerapan digitalisasi informasi dan sistem akuntabilitas publik.

TABEL 2. UMUR

Range	Jumlah
<17 tahun	0
17-25 tahun	30
26-35 tahun	127
>35 tahun	28

Sumber: Diolah (2025)

Tabel 2 menjelaskan responden dengan rentang usia 26–35 tahun merupakan kelompok yang paling dominan, yaitu sebanyak 127 orang dari total 185 responden. Kelompok usia ini umumnya berada pada masa produktif dan memiliki pengalaman kerja yang cukup matang dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan penerapan sistem digitalisasi. Sementara itu, terdapat 30 responden yang berusia antara 17–25 tahun, menunjukkan keterlibatan generasi muda yang mulai berperan dalam sistem administrasi publik dan mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan. Selain itu, responden dengan usia >35 tahun berjumlah 28 orang, yang kemungkinan besar memiliki posisi atau jabatan dengan tingkat tanggung jawab lebih tinggi, serta berperan sebagai pengambil keputusan strategis. Tidak terdapat responden yang berusia di bawah 17 tahun, menandakan bahwa seluruh partisipan merupakan individu yang telah memenuhi kriteria usia kerja formal. Secara keseluruhan, distribusi usia ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada usia produktif dan adaptif

terhadap perubahan teknologi, sehingga relevan dengan tema penelitian yang berkaitan dengan efektivitas pengendalian biaya publik, digitalisasi informasi keuangan, dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

TABEL 3. LOKASI

Lokasi	Jumlah
Jakarta Utara	32
Jakarta Barat	53
Jakarta Timur	17
Jakarta Selatan	58
Jakarta Pusat	25

Sumber: Diolah (2025)

Tabel 3 menjelaskan lokasi menunjukkan bahwa jumlah terbesar berasal dari Jakarta Selatan sebanyak 58 orang, diikuti oleh Jakarta Barat sebanyak 53 orang, dan Jakarta Utara sebanyak 32 orang. Sementara itu, Jakarta Pusat memiliki 25 responden, dan jumlah terkecil berasal dari Jakarta Timur sebanyak 17 orang. Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden berdomisili atau bekerja di wilayah dengan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik yang tinggi, seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Hal ini dapat mencerminkan tingkat keterlibatan yang lebih besar di wilayah tersebut dalam implementasi kebijakan digitalisasi informasi keuangan dan pengendalian biaya publik yang menjadi fokus penelitian ini.

TABEL 4. PEKERJAAN

Pekerjaan	Jumlah
ASN	62
Swasta	86
Wirausaha	24
Lain-lain	13

Sumber: Diolah (2025)

Tabel 4 menjelaskan mayoritas responden dalam penelitian ini bekerja di sektor swasta sebanyak 86 orang, diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 62 orang, wirausaha sebanyak 24 orang, dan lain-lain sebanyak 13 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa responden penelitian berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, baik dari sektor publik maupun non-publik, sehingga memberikan perspektif yang lebih beragam terhadap isu efektivitas pengendalian biaya publik dan digitalisasi informasi keuangan. Dominasi responden dari sektor swasta menggambarkan keterlibatan aktif pihak non-pemerintah dalam memahami dan menilai kinerja serta akuntabilitas sistem keuangan publik, sedangkan partisipasi ASN menunjukkan pandangan langsung dari pelaksana kebijakan di lingkungan pemerintahan.

TABEL 5. STATISTIK DESKRIPTIF

Var.	N	Mean	Min	Max	Std.Var
X1	185	3.82	1	5	0.71
X2	185	3.95	1	5	0.65
Z	185	3.88	1	5	0.68
Y	185	4.01	1	5	0.60

Sumber: Diolah (2025)

Tabel 5 menjelaskan statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian memiliki nilai rata-rata (mean) yang berada di atas angka 3,5, yang mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap masing-masing variabel berada pada kategori tinggi. Variabel Efektivitas Pengendalian Biaya Publik (X1) memiliki nilai rata-rata 3,82 dengan standar deviasi 0,71, menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai pengendalian biaya publik telah berjalan dengan baik meskipun terdapat sedikit variasi persepsi antar responden. Selanjutnya, variabel Digitalisasi Informasi Keuangan (X2) memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 3,95 dengan standar deviasi 0,65, menandakan bahwa penerapan sistem digitalisasi dalam pengelolaan informasi keuangan dinilai efektif dan telah diimplementasikan secara optimal di instansi terkait. Sementara itu, variabel Akuntabilitas (Z) memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,88 dengan standar deviasi 0,68, menunjukkan bahwa tingkat tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik sudah berada dalam kategori baik. Adapun variabel Kinerja Pemerintah (Y) memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,01 dengan standar deviasi 0,60, yang menggambarkan bahwa kinerja pemerintah secara umum dinilai efektif oleh responden. Hasil ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengendalian biaya publik, digitalisasi informasi keuangan, dan akuntabilitas secara umum telah berkontribusi positif terhadap peningkatan

kinerja pemerintah. Hasil statistik deskriptif tersebut menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki persepsi yang positif terhadap pengelolaan keuangan publik dan kinerja pemerintah. Nilai rata-rata yang tinggi pada seluruh variabel mengindikasikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya dalam hal pengendalian biaya dan digitalisasi informasi keuangan, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori akuntansi sektor publik yang menyatakan bahwa transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong peningkatan kinerja organisasi pemerintah. Rendahnya nilai standar deviasi pada seluruh variabel juga menunjukkan bahwa jawaban responden relatif homogen, sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi yang terbentuk cukup konsisten di antara responden, hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu Zong (2025) dan Nurhayati et al. (2022). Lebih lanjut, tingginya variabel digitalisasi informasi keuangan dan kinerja pemerintah mengindikasikan adanya hubungan yang erat antara pemanfaatan teknologi dan peningkatan kinerja sektor publik. Digitalisasi memungkinkan proses pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan, cepat, dan akurat, sehingga mendukung terciptanya akuntabilitas yang lebih baik. Dalam konteks ini, akuntabilitas sebagai variabel moderasi berpotensi memperkuat pengaruh variabel independen terhadap kinerja pemerintah. Artinya, semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan, maka efektivitas pengendalian biaya publik dan digitalisasi informasi keuangan akan semakin optimal dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Hasil ini memperkuat pentingnya integrasi antara sistem pengendalian internal, teknologi informasi, dan prinsip akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

TABEL 6. HASIL (SEBELUM MODERASI)

Var.	Coef.	t	P>t	Sig.
Cons.	1.368	6.91	0.000	-
X1	0.354	11.80	0.021	H1 (+)
X2	0.490	5.10	0.004	H2 (+)

Sumber: Diolah (2025)

Tabel 6 menjelaskan efektivitas pengendalian biaya publik (X1) menunjukkan koefisien sebesar 0,354 dengan nilai t sebesar 11,80 dan p-value ($P>|t|$) sebesar 0,021. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Arah pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian biaya publik, maka kinerja pemerintah cenderung meningkat. Dengan demikian, hipotesis H1 yang menyatakan bahwa efektivitas pengendalian biaya publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah dinyatakan diterima. Variabel digitalisasi informasi keuangan (X2) memiliki koefisien sebesar 0,490 dengan nilai t sebesar 5,10 dan p-value sebesar 0,004. Nilai signifikansi ini juga lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa X2 berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Arah hubungan yang positif menandakan bahwa semakin tinggi penerapan digitalisasi dalam informasi keuangan, maka kinerja pemerintah akan semakin baik. Oleh karena itu, hipotesis H2 yang menyatakan bahwa digitalisasi informasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah juga diterima. Hasil ini memberi gambaran bahwa kedua variabel independen, yaitu efektivitas pengendalian biaya publik dan digitalisasi informasi keuangan, memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah. Namun, hasil ini belum mempertimbangkan peran akuntabilitas sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, analisis selanjutnya penting untuk mengevaluasi apakah akuntabilitas dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap kinerja pemerintah, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap model penelitian secara keseluruhan.

Hal ini menjelaskan efektivitas pengendalian biaya publik (X1) menunjukkan koefisien sebesar 0,354 dengan nilai t sebesar 11,80 dan p-value ($P>t$) sebesar 0,021. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Arah pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian biaya publik, maka kinerja pemerintah cenderung meningkat. Dengan demikian, hipotesis H1 yang menyatakan bahwa efektivitas pengendalian biaya publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah dinyatakan diterima sesuai dengan penelitian (Paso et al., 2025; Sarnawiah et al., 2025). Variabel digitalisasi informasi keuangan (X2) memiliki koefisien sebesar 0,490 dengan nilai t sebesar 5,10 dan p-value sebesar 0,004. Nilai signifikansi ini juga lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa X2 berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Arah hubungan yang positif menandakan bahwa semakin tinggi penerapan digitalisasi dalam informasi keuangan, maka kinerja pemerintah akan semakin baik. Oleh karena itu, hipotesis H2 yang menyatakan bahwa digitalisasi informasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah juga diterima. Hasil ini memberi gambaran bahwa kedua variabel independen, yaitu efektivitas pengendalian biaya publik dan digitalisasi informasi keuangan, memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah sesuai dengan penelitian (Alassuli et al., 2025, Nurhayati et al., 2022). Namun, hasil ini belum mempertimbangkan peran akuntabilitas sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, analisis selanjutnya penting untuk mengevaluasi apakah akuntabilitas dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap kinerja

pemerintah, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap model penelitian secara keseluruhan.

TABEL 7. HASIL (SETELAH MODERASI)

Var.	Coef	t	P>t	Sig.
Cons.	0.945	4.86	0.000	-
X1*Z	0.136	2.98	0.030	H3 (+)
X2*Z	0.109	2.03	0.013	H4 (+)

Sumber: Diolah (2025)

Tabel 7 menjelaskan hasil moderasi menunjukkan bahwa interaksi antara efektivitas pengendalian biaya publik dan akuntabilitas (X1*Z) memiliki koefisien sebesar 0,136 dengan nilai *t* sebesar 2,98 dan *p-value* sebesar 0,030. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa akuntabilitas secara signifikan memoderasi hubungan antara efektivitas pengendalian biaya publik terhadap kinerja pemerintah. Arah koefisien yang positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka pengaruh efektivitas pengendalian biaya publik terhadap kinerja pemerintah akan semakin kuat. Hasil interaksi variabel efektivitas pengendalian biaya publik dan akuntabilitas (X1*Z) memiliki koefisien sebesar 0,136 dengan nilai *t* sebesar 2,98 dan *p-value* sebesar 0,030. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa akuntabilitas secara signifikan memoderasi hubungan antara efektivitas pengendalian biaya publik terhadap kinerja pemerintah. Arah koefisien yang positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka pengaruh efektivitas pengendalian biaya publik terhadap kinerja pemerintah akan semakin kuat. Dengan demikian, hipotesis H3 yang menyatakan bahwa akuntabilitas memperkuat pengaruh efektivitas pengendalian biaya publik terhadap kinerja pemerintah dinyatakan diterima. Interaksi antara digitalisasi informasi keuangan dan akuntabilitas (X2*Z) memiliki koefisien sebesar 0,109 dengan nilai *t* sebesar 2,03 dan *p-value* sebesar 0,013. Hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas juga secara signifikan memoderasi hubungan antara digitalisasi informasi keuangan terhadap kinerja pemerintah sesuai dengan penelitian Bovens (2021). Nilai koefisien yang positif mengindikasikan bahwa dalam kondisi akuntabilitas yang tinggi, penerapan digitalisasi informasi keuangan akan berdampak lebih besar terhadap peningkatan kinerja pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis H4 yang menyatakan bahwa akuntabilitas memperkuat pengaruh digitalisasi informasi keuangan terhadap kinerja pemerintah diterima. Secara keseluruhan, hasil moderasi ini menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan faktor penting yang memperkuat hubungan antara variabel independen (efektivitas pengendalian biaya publik dan digitalisasi informasi keuangan) terhadap kinerja pemerintah. Hasil ini menyoroti bahwa kinerja pemerintah tidak hanya ditentukan oleh implementasi kebijakan dan sistem digital, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaannya (Omar et al., 2023). Dengan kata lain, peningkatan kinerja akan lebih optimal jika didukung oleh sistem akuntabilitas yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

TABEL 8. VIF

Var.	VIF
X1	1.607
X2	1.440
Z	1.517

Sumber: Diolah (2025)

Tabel 8 menjelaskan VIF tersebut berada di bawah ambang batas umum yaitu 10 (dibawah 10 sebesar 1,607; 1,440; 1,517), bahkan jauh di bawah angka 5, yang berarti tidak terdapat indikasi multikolinearitas antarvariabel independen dalam model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki kontribusi yang unik dan tidak saling memengaruhi secara berlebihan dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu Kinerja Pemerintah. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat dinyatakan baik dan sesuai.

IV. CONCLUSION

Hasil pengujian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian biaya publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menandakan bahwa semakin efektif pengendalian biaya publik yang diterapkan, semakin efisien pula alokasi dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung peningkatan kinerja organisasi pemerintah. Pengendalian biaya yang baik menjadi indikator penting dalam menjaga disiplin fiskal dan efisiensi penggunaan anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, hasil penelitian juga membuktikan bahwa digitalisasi informasi keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah. Implementasi sistem digital dalam pengelolaan keuangan publik mampu meningkatkan transparansi, mempercepat

proses pelaporan, serta meminimalisir kesalahan administratif. Digitalisasi memberikan kemudahan bagi aparatur dalam mengakses, mengolah, dan menganalisis data keuangan, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, penerapan teknologi informasi di bidang keuangan publik berperan penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan. Selain itu, hasil uji interaksi menunjukkan bahwa Akuntabilitas berhasil memoderasi hubungan antara variabel independen dan kinerja pemerintah. Akuntabilitas memperkuat pengaruh efektivitas pengendalian biaya publik dan digitalisasi informasi keuangan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka semakin besar dampak positif dari pengendalian biaya dan digitalisasi terhadap peningkatan kinerja. Akuntabilitas mendorong aparatur untuk bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik secara transparan dan efisien, sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat dan memperluas pemahaman terhadap teori Good Governance dan Agency Theory, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Efektivitas pengendalian biaya publik dan digitalisasi informasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah, serta diperkuat oleh akuntabilitas sebagai variabel moderasi, memberikan bukti empiris bahwa tata kelola keuangan yang baik tidak hanya bergantung pada efisiensi pengeluaran, tetapi juga pada mekanisme pertanggungjawaban publik yang kuat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai pengaruh sinergis antara efisiensi, digitalisasi, dan akuntabilitas terhadap peningkatan kinerja sektor publik. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran bagi pemerintah daerah dan instansi publik bahwa peningkatan kinerja dapat dicapai melalui optimalisasi sistem pengendalian biaya serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proses keuangan dijalankan secara efisien, transparan, dan terdigitalisasi untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi. Penguatan sistem digital keuangan publik juga dapat membantu meningkatkan pengawasan, mempercepat proses pelaporan, serta mengurangi potensi penyimpangan anggaran. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan keuangan publik yang lebih akuntabel dan efisien. Selain itu, secara strategis, penelitian ini menekankan pentingnya membangun budaya akuntabilitas di lingkungan birokrasi sebagai penguat utama dalam hubungan antara efisiensi biaya dan digitalisasi keuangan terhadap kinerja pemerintah. Peningkatan kapasitas aparatur dalam hal kompetensi teknologi dan kesadaran etika publik menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem digital dan pengendalian biaya yang efektif. Oleh karena itu, lembaga pemerintah disarankan untuk terus melakukan pelatihan, monitoring, serta evaluasi berkala terhadap penerapan sistem keuangan digital dan mekanisme pertanggungjawaban publik agar kinerja organisasi semakin optimal dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

REFERENCES

- Alassuli, A., Thuneibat, N. S., Eltweri, A., Al-Hajaya, K., & Alghraibeh, K. (2025). The Impact of Accounting Digital Transformation on Financial Transparency: Mediating Role of Good Governance. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(5), 272. DOI: 10.3390/jrfm18050272 MDPI
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2019). *Management Control Systems*. McGraw-Hill Education.
- Bovens, M. (2010). "Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism." *West European Politics*, 33(5), 946–967.
- Bovens, M. (2021). The quest for public accountability: Lessons from recent scholarship. *Public Administration Review*, 81(4), 691–699. <https://doi.org/10.1111/puar.13317>
- Indrajit, R. E. (2020). *Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Kementerian Keuangan RI. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kurniawan, B., & Yusuf, M. (2021). Good Governance dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 7(2), 87–99.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyani, D., & Sari, R. (2021). Akuntabilitas Publik dan Efisiensi Anggaran dalam Sektor Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 9(2), 112–125.
- Nurhayati, N., Abdullah, A., & Mulyani, S. (2022). Public sector performance measurement in the digital era: Evidence from Indonesian local governments. *Journal of Accounting and Public Policy*, 41(3), 106–121. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2022.106921>
- OECD. (2021). *Government at a glance 2021*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1c258f55-en>

- Omar, B., Rahman, R. A., & Said, J. (2023). Accountability and transparency in public financial management: Evidence from Southeast Asia. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 35(2), 245–262. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-12-2021-0203>
- Putra, I. G. A., Sudarma, I. M., & Dewi, L. P. (2023). Peran Akuntabilitas dalam Memediasi Hubungan Pengendalian Internal dan Kinerja Aparatur Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 11(3), 210–223.
- Rahmawati, E., & Wahyudi, A. (2022). Digitalisasi Informasi Keuangan dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah di Era Industri 4.0. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 6(1), 45–57.
- Rivero del Paso, L., Cho, C., & Narvaez Terron, R. (2025). Making Cost Data Work for Public Financial Management. *IMF Working Paper* No. 2025/159. DOI: 10.5089/9798229021470.001
- Sarnawiah, S., Andi Amri, Narto Irawan Otoluwa, N. A. Hamid, & Aulia Pratiwi. (2025). Analisis Efektivitas Pengendalian Biaya Operasional pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pangkep. *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 7(1), artikel 2716. DOI: 10.46918/point.v7i1.2716
- Susanto, A. (2017). Sistem Informasi Akuntansi: Struktur Pengendalian Risiko dan Pengembangan. *Bandung: Lingga Jaya*.